

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, efektif dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019, merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu materi LAKIP disajikan secara obyektif dan transparan yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membantu Kepala Daerah dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

Dengan LAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 semoga dapat bermanfaat untuk dilingkungan Seretaris Daerah pada umumnya dan lingkungan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan mengantisipasi kendala/ hambatan yang terjadi dimasa akan datang dalam menyusun LAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja, tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja serta penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan LAKIP juga menjadi salah satu upaya mendorong capaian kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rencana Strategis BPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 mengacu pada Visi 1 (Pertama) Kepala Daerah tahun 2016 – 2021 yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Madiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dapat diidentifikasi program kegiatan yang termasuk dalam bidang pengelolaan Keuangan dan BMD Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Pengembangan data atau informasi
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

Laporan Kinerja Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama Tahun Anggaran 2019 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang di gambarkan dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2019
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	100 %	100 %
		Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	100 %
2.	Terwujudnya tata kelola Barang Milik daerah yang Akuntabel	Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	100 %	85 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	Hasil Penilaian AKIP BPKD	A	A

Adapun 4 (a) indikator kinerja beserta capaian kinerjanya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Ketepatan penyusunan dokumen RAPBD tepat waktu, bahwa proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Tahun 2018 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian secara bersama – sama pihak eksekutif dan legislative menyetujui Rancangan APBD Tahun 2019 pada Tanggal 27 Desember 2018 kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Adapun APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.772.707.595.258,-

2. Persentase laporan keuangan daerah yang akuntabel, SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 45 SKPD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan SKPD kemudian dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3. Persentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana dari 45 SKPD yang telah melaksanakan Penatausahaan Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebanyak 39 SKPD atau 85 % dari SKPD yang ada lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelolaan Barang Milik Daerah secara benar dan taat aturan merupakan salah satu syarat untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan Laporan Barang Milik Daerah akan mencerminkan kondisi kekayaan daerah yang dimanfaatkan untuk operasional perangkat daerah guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) N comor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pertanggungjawaban tersebut diatas selanjutnya disampaikan oleh masing-masing instasi pemerintah termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan umum bidang pemerintahan umum, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai

PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan III

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Bupati, tentang Pembentukan Tata kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Stuktural Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Perangkat Daerah melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

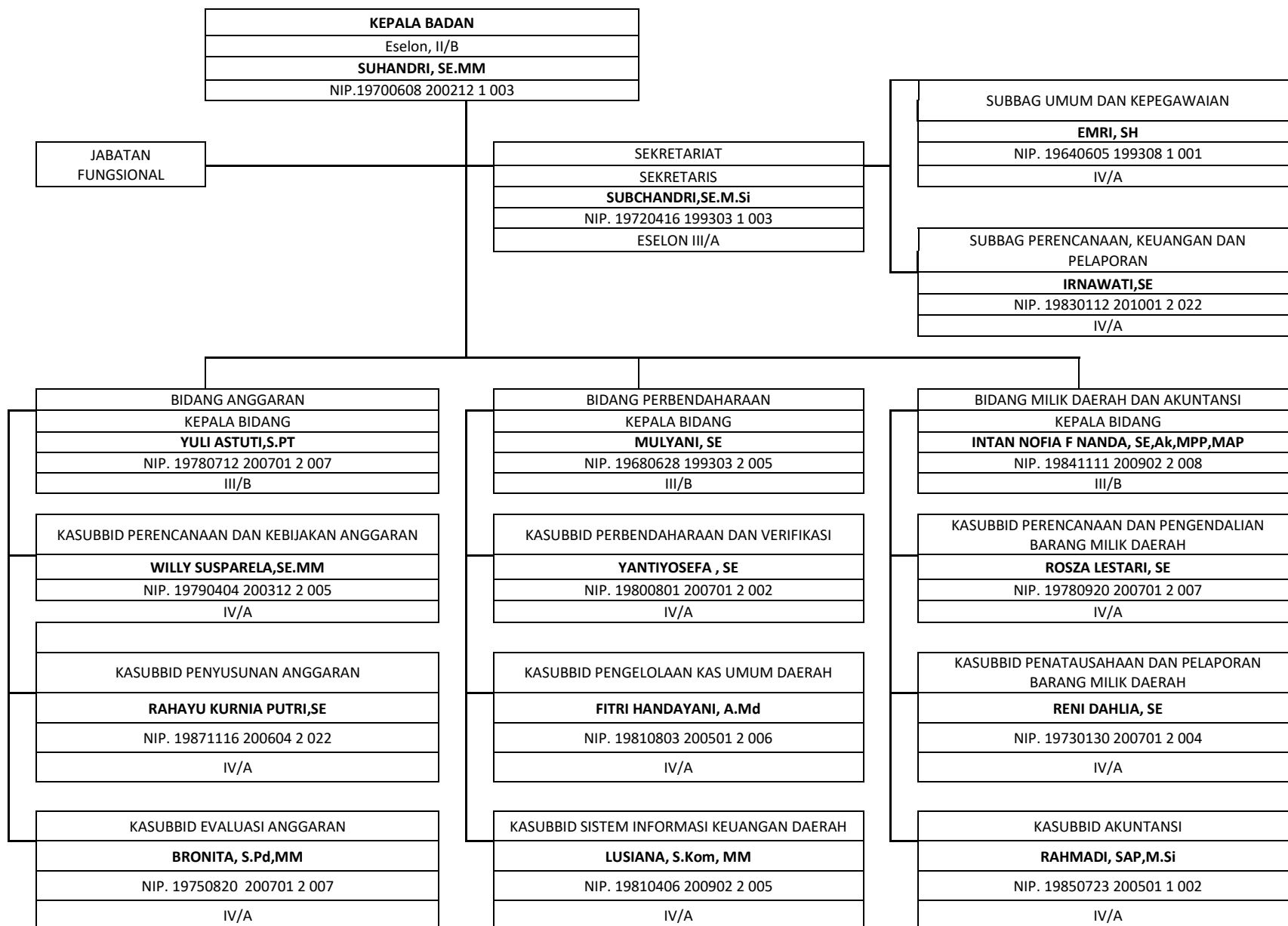
Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada point 1 , Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang , pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Pembinaan unit pelaksana teknis, Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - Penggunaan anggaran dinas;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan wewenang

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 46 Tahun 2016, Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (Tiga) Bidang, Sekretariat dibantu 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang dibantu 3 (Tiga) Seksi.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

a. Kepala Badan.

b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Anggaran, membawahi :

- a) Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran;
- b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
- c) Sub Bidang Evaluasi Anggaran.

2. Bidang Perbendaharaan membawahi :

- a) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
- b) Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah; dan
- c) Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

3. Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi, membawahi:

- a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- b) Sub Bidang Penatusahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
- c) Sub Bidang Akuntansi.

Jumlah Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019 adalah sebanyak 33 orang :

Tabel. 1.1
Jumlah ASN Lingkup BPKD

No	Golongan	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin
1.	IV	S2	2 orang	2 (L)
2	III	S2	6 orang	1 (L) dan 5 (P)
	III	S1	15 orang	5 (L) dan 10 (P)
	III	D3	1 orang	1 (P)
	III	SMA		
2.	II	SMA	9 orang	5 (L) dan 4 (P)

1.3 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkup BPKD

NO	JENIS	UNIT
A	Kendaraan Operasional	
1.	Kendaraan Roda 4	3
2	Kendaraan Roda 2	20
B	Alat kantor dan Rumah Tangga	
1.	AC	26
2.	Laptop	57

3.	Personal Komputer	33
4.	Printer	48
5.	Kursi Rapat	185
6.	Kursi eselon II	1
7.	Kursi eselon III	5
8.	Kursi eselon IV	15
9.	Server	4
10.	Kursi tamu	11 set
11.	TV	5
12.	Almari besi	17
13.	Brankas	2
14.	Almari kayu	13
15.	Stabilizer	26
16.	Meja	60
17.	Infocus	5
18.	Warles	2
19.	Dispenser	3
20.	Kulkas	1
21.	Filling cabinet	17
22.	Mesin penghancur	3

23.	Ipad	10
24.	Camera	2
25.	Handicam	1
26.	Fexsimil	1
27.	Mesin absensi	2
28.	Pingger look	4

1. ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/ PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

A. ISU-ISU STRATEGIS

1. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
2. Belum tertatanya manajemen aset daerah
3. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
4. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan
5. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Bagian ini akan menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar,

permasalahan di BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi, manajemen aset daerah dan teknologi informasi yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah.
2. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu dengan berbasis Aplikasi. Sehingga diharapkan Kabupaten Pesisir Selatan tetap bisa mempertahankan *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan Aset lambat atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga ASET daerah merupakan hal penting yang melengkapi penyusunan LKPD atau laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dengan berbasis Aplikasi.
3. Adanya keterbatasan Dana dalam pengalokasian Anggaran oleh SKPD dalam pemenuhan pembangunan daerah kabupaten pesisir selatan.
4. Rendahnya koordinasi antar seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan berdampak tidak optimalnya dalam pelaporan Aset
5. Belum optimalnya pencapaian efisiensi dan efektifitas Anggaran oleh seluruh SKPD

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun
yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019**

**Tabel 1.3
Laporan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2019**

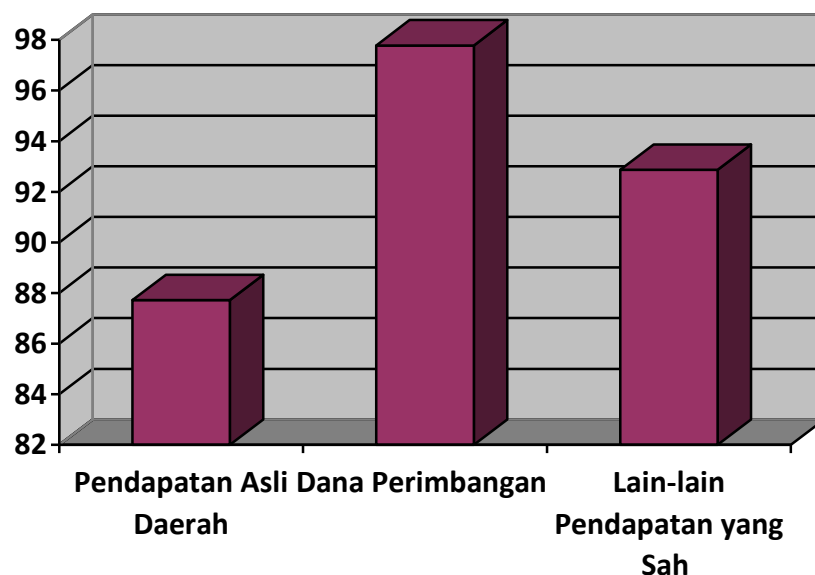
No	Uraian	Tahun		
		2019	2018	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.772.707.595.258	1.524.460.861.814,36	-

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. pada TA. 2019 Pendapatan di Anggaran Rp. 1.772.707.595.258,- dan terealisasi sebesar Rp.1.699.253.293.425,43 atau sengan capaian sebesar 95,86 yang terdiri dari :

**Tabel 1.3.1
Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah TA. 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pendapatan Asli Daerah	153.941.080.200	135.032.868.843,43	87,72 %
Dana Perimbangan	1.241.343.355.079	1.213.725.540.008	97,78 %
Lain-lain Pendapatan yang Sah	377.423.159.979	350.494.884.574	92,87 %
Jumlah	1.772.707.595.258	1.699.257.519.145,43	95,86 %

Grafik 1.3.1
Pendapatan Daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah TA. 2019



Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Target PAD TA.2019 adalah sebesar Rp.153.941.080.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 135.032.868.843,43 atau 87,72 %.

Tabel 1.4
Laporan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019

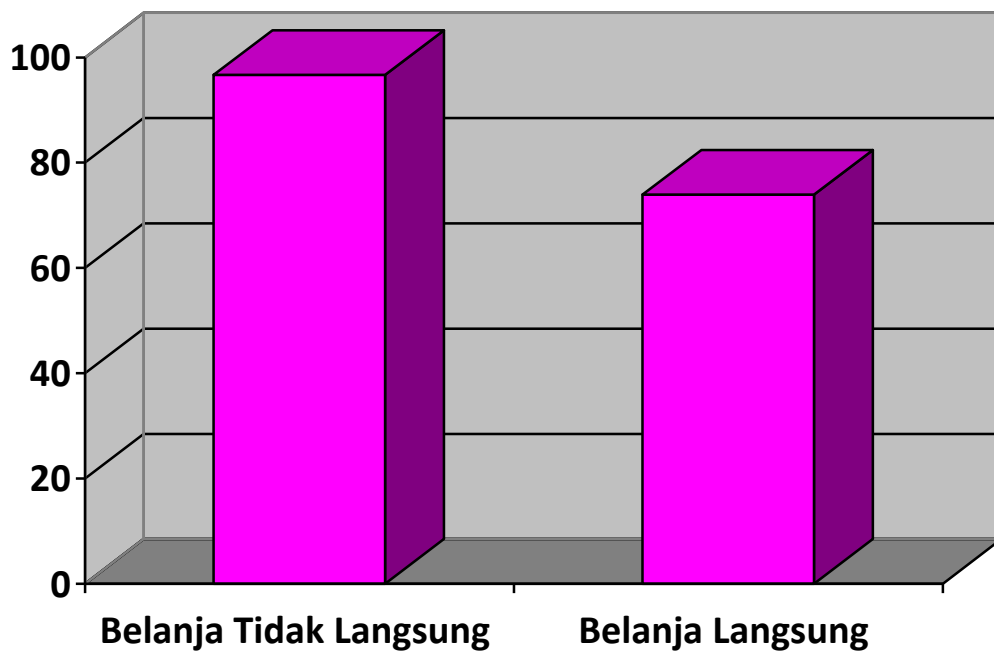
No	Uraian	Tahun		
		2019	2018	Keterangan
1.	Belanja Daerah	1.846.923.981.831,39	1.502.826.507.023,95	-

Pada TA. 2019 Belanja di Anggaran sebesar Rp. 1.846.923.981.831,39 dan Realisasi sebesar Rp. 1.693.640.789.061,71 atau sebesar 91,70 %, yang terdiri dari :

Tabel 1.4.1
Tabel Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	986.638.835.120,09	967.438.547.374,71	98,15 %
2.	Belanja Langsung	861.285.146.711,30	726.202.241.687,00	84,32 %

Grafik 1.4.1
Tabel Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Misi Bupati yang Didukung oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016 -2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan diakhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UMGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA**” berdasarklan visi diatas maka ada lima Misi dalam pencapaian pembangunan yang akan diwujudkan dan Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada **Misi pertama RPJMD** Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang berbunyi : **“MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT”**

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih KKN, Akuntabilitas dan Berkinerja Serta Pelayanan Publik yang Prima	1. Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

TABEL IKU													
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019													
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi			Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1 Prosentase penyusunan APBD Tepat Waktu	Jumlah Tersusunnya APBD Tepat Waktu Penetapan APBD	x	100	Bulan Desember	Bulan Desember	Bulan Desember	100%	100%	100%	Nota Kesepakatan	Bidang Anggaran
		2 Prosentase laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	x	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Keuangan SKPD	Bidang BMD dan Akuntansi dan Perbendaharaan
2	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1 Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Total BMD se Kab. Pesisir Selatan	x	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Aset SKPD	Bidang BMD dan Akuntansi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1 Hasil Penilaian AKIP BPKD	Nilai SAKIP			B	B	B	A	A	A	LKJ	Sekretariat

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu 2. Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 % 100 %
2.	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1. Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1. Hasil Penilaian AKIP BPKD	A

Tabel. 2.4

**Sasaran 1 (satu) pada RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021
dan Singkronisasi dengan Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah**

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Taat Azas	Penilaian LKD	WTP	WTP	100%

Tabel 2.5
Program yang mendukung Tujuan

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	106.205.799	101.956.292	96,00
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	74.998.487	71.066.513	94,76
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.125.653.235	2.773.287.801	88,73
4.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	24.643.312	20.467.373	83,05
Jumlah		3.331.500.833	2.966.777.979	89,05

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

**3.1.Tabel
Capaian Kinerja Organisasi**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri Unggul, Agamis dan Sejahtera				
Misi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib				
Tujuan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Taat Azas				
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Berkualitas	1 Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		2 Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%

2	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1 Prosentase Barang Milik Daerah yang Berkualitas	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1 Hasil Penilaian AKIP BPKD	A	A	A

3.2. Analisa Capaian Kinerja Per Sasaran

a. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Tabel 3.2.1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
	2 Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	100 %	100 %

Dari table 3.2.1 diatas dapat dilihat capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategi 1 (satu) termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**

b. Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas

Tabel 3.2.2

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	100 %	85 %	85 %

Dari table 3.2.2 diatas dapat dilihat capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 85%. Pencapaian sasaran strategi 2 (dua) ini termasuk kategori **Berhasil**.

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD

Tabel 3.2.3

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Hasil Penilaian AKIP BPKD	A	A	A

Dari table 3.2.3 diatas dapat dilihat capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 dengan target A, dan Terealisasi dengan Capaian nilai AKIP BPKD A Tahun 2018 (n – 1).

d. Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

Tabel 3.2.4

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian 2018	Capaian 2019
1	1 Prosentase Penyusunan APBD Tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
	2 Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1 Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	100 %	100 %	85 %	85 %
3	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	A	A	A	A

3.2.1. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

Dalam Pencapaian target kinerja sasaran, terdapat factor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas merupakan sasaran pertama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Taat Azas, hasil capaian kinerja sasaran satu ini sudah tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1
Tabel Sasaran 1 dan Indikator 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 1 yaitu : Ketepatan waktu penyusunan APBD yang mana predikat ketepatan waktu penyusunan APBD dengan target penyampaian tepat waktu yaitu Bulan Desember sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tercapai yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 Nomor 33 Tahun 2018 pada tanggal 27 Desember 2018.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator satu ini yaitu :

1. Melakukan Koordinasi dengan seluruh Kasubag Perencanaan SKPD melalui Forum Group Discusion (FGD) untuk segera menyusun RKA SKPD sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Foto. 3.2.1.1
Forum Grpoup Discution (FGD)



2. Melakukan Pembahasan Anggaran sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan, pembahasan dilakukan antartara Tim Pembahasan Anggaran yang sudah di bentuk dengan SKPD yang akan di bahas, pembahasan disini akan dilihat singkronisasi antara Kegiatan yang diajukan dengan kebutuhan Anggaran yang diperlukan dan juga dilihat Outcame atau dampak dari kegiatan tersebut, pada pembahasan ini SKPD yang dibahas harus sesuai dengan Standar Harga yang telah ditetapkan, Standar Biaya dan ASB.
3. Penyusunan RKA/DPA dengan berbasis Aplikasi SIPKD yang mana Aplikasi ini sudah terstruktur dan dapat sebagai pengendalian dalam penyusunann Anggaran oleh SKPD terhadap plafon Anggaran yang telah ditetapkan pada saat KUA PPAS.

Foto. 3.2.1.3
Aplikasi SIPKD Modul Penganggaran



4. Cetak APBD setiap bulan Desember dengan tepat waktu.



Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Tidak mengakomodir adanya kegiatan yang perencanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ada di e-planing, karena hal ini akan mengakibatkan penyusunan APBD terlamabat/tidak tepat waktu.

Upaya Perbaikan

1. Diadakan Sosialisasi penyusunan APBD baik berupa sosialisasi dan surat edaran tentang prosedur dan peraturan dalam penyusunan RKA SKPD
2. Adanya Forum Group Discation (FGD) Perencanaan yang menunjang koordinasi dan kelancaran dari seluruh SKPD Lingkup Pesisir Selatan

Tabel. 3.2.1.2
Sasaran 1 dan Indikator 2

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	2. Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 2 yaitu : Persentase Laporan Keuangan 45 SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan keuangan SKPD kemudian dikomplikasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang mana predikat dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini dengan target 100 % sudah dan terealisasi 100% atau seluruh SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatani.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator dua ini yaitu :

1. Melakukan rekonsiliasi antara BPKD selaku SKPD se Kab. Pesisir Selatan. Rekonsiliasi dilaksanakan secara Periodik (Bulanan), meliputi Laporan Keuangan dan Laporan BMD, Untuk setiap rekonsiliasi yang dilaksanakan, hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Foto. 3.2.1.2.1
Rekonsiliasi dengan SKPD



2. Menambah aparatur Satuan Kerja di SKPKD yang mana Aparatur yang diberdayakan ini adalah dengan latar belakang berpendidikan Akuntansi yang dapat diandalkan dalam menunjang penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Tahun 2018 dan 2019, telah dilakukan penambahan tenaga Akuntansi di Bid BMD Akun BPKD menjadi sebanyak 4 Orang. Setiap Tahun Anggaran bertugas melakukan Rekonsiliasi, mereview kesesuai pencatatan dan Akuntansi Laporan SKPD dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Foto. 3.2.1.2.2
Aparatur Satuan Kerja SKPKD



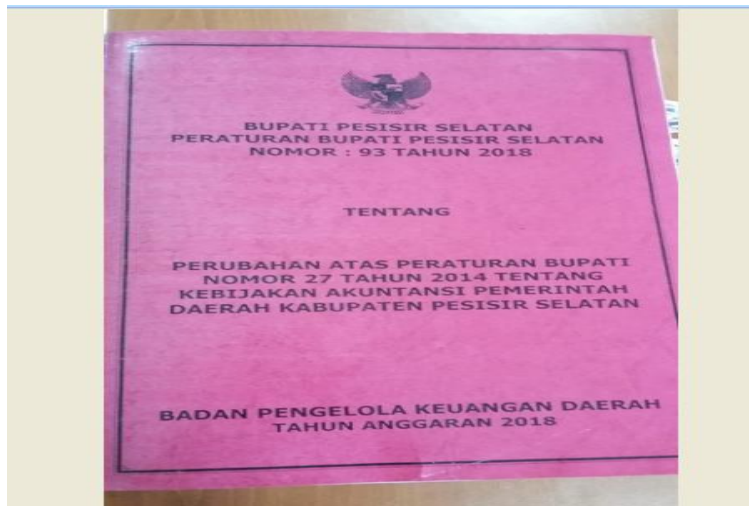
3. Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berbasis Aplikasi SIPKD yang mana Aplikasi ini sudah dipakai dalam penyusunan pertanggungjawaban SKPD dan memudahkan SKPD dalam pelaksanaan tugas

Foto. 3.2.1.2.3
Aplikasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Aplikasi SIPKD



4. Revisi Kebijakan Akuntansi sesuai SAP dan kondisi spesifik Pemerintah Daerah.

Foto. 3.2.1.2.4
Revisi Kebijakan Akuntansi N.93 Tahun 2018



Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Masih kurangnya kemampuan SDM SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Upaya Perbaikan

Diadakan Bimtek terhadap PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Foto. 3.2.1.2.5
Revisi Kebijakan Akuntansi N.93 Tahun 2018



1.2.Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas

Meningkatnya tata Kelola Barang Milik Daerah merupakan sasaran kedua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Taat Azas, hasil capaian kinerja sasaran dua ini tercapai dengan 85% dengan target 100 % yang mana capaian 85 % ini masi ada yang belum tercapai yaitu : Belum adanya Perda BMD, Aplikasi pendukung belum Update, Masih kurangnya pelatihan personil Aplikasi BMD dan tidak ada Pejabat Penilai yang Bersertifikasi.

Tabel. 3.2.1.2
Tabel Sasaran 2 dan Indikator 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Persentase Perangkat Daerah Taat pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	85%	85 %

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 1 yaitu : Persentase Perangkat Daerah Taat Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mana dengan target 100 % sudah tercapai sebanyak 85% yang mana dari 45 SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah melaksanakan penatausahaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebanyak 35 SKPD atau 85%.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator satu pada sasaran dua ini yaitu :

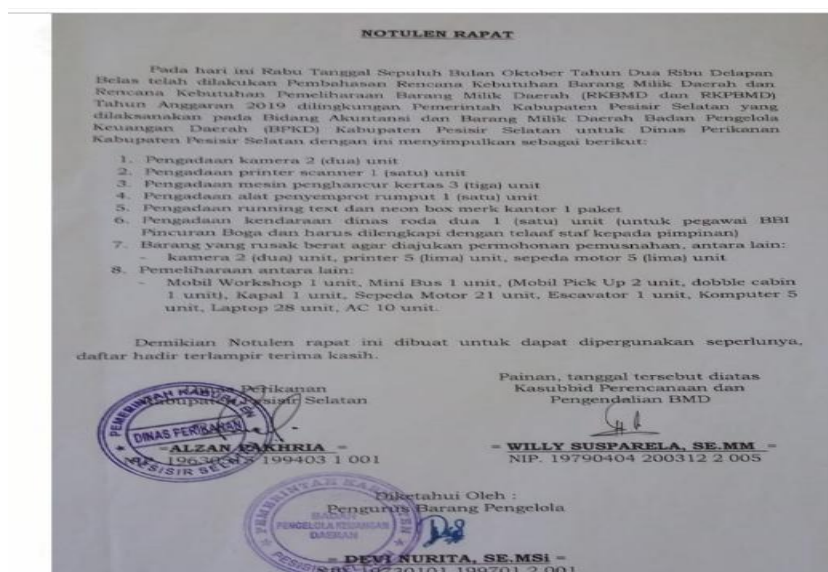
1. Melakukan Rekonsiliasi BMD setiap Triwulan dengan seluruh SKPD yaitu mencocokkan LRA- Belanja Modal dengan rekap Item Belanja Barng di SKPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen Pertanggungjawaban dan Pengadaan (SPK)

Foto. 3.2.1.2.1
Rekonsiliasi BMD antara staf BMD dan Pengurus Barng SKPD



2. Melakukan perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap Tahunnya sesuai dengan Renja SKPD dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA SKPD

Foto. 3.2.1.2.2
Notulen RKBMD dan RKPBM



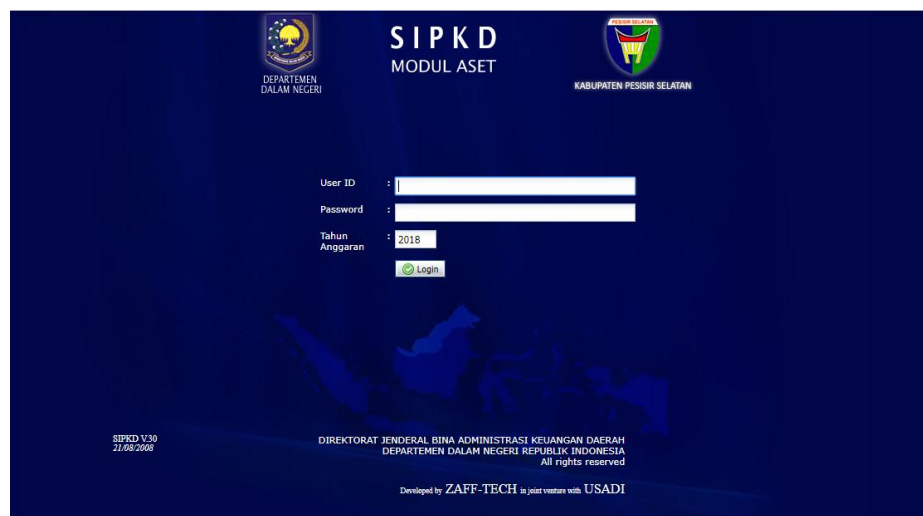
3. Melakukan cek fisik Barang Milik Daerah bagi SKPD yang akan mengusulkan penghapusan BMD sesuai dengan usulan SKPD

Foto. 3.2.1.2.3
Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat
di RSUD M.Zain Painan



4. Penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan Modul SIPKD Aset yang mana pada modul ini sudah tertata penatausahaan Barang Milk Daerah sesuai dengan aturan yang ada.

Foto. 3.2.1.2.4
Aplikasi Modul Aset



Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

1. Masih kurangnya kemampuan SDM SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku.
2. Tingginya tingkat pergantian pengurus barang SKPD yang menyebabkan kurangnya konsistensi pemahaman pengelolaan Aset dan kontinuitas pengelolaan Barang Milik Daerah

Upaya Perbaikan

Diadakan Bimtek tentang Penatausahaan tertib Administrasi Barang Milik Daerah.

a. Data- data pendukung Pencapaian Kinerja

1. Melakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan seluruh SKPD mengenai laporan keuangan
2. Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
3. Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait

b. Prestasi yang dicapai dalam pencapaian sasaran

Prestasi yang dicapai dalam pencapaian Sasaran dan Tujuan adalah :

Penyusunan Anggaran Tepat Waktu dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dalam tujuan yang di capai adalah OPINI BPK dalam pemeriksaan Laporan keuangan. Opini BPK yang tercapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

B. Realisasi Anggaran

1. Tabel Sasaran , Anggaran , Realisasi dan Capaian Keuangan

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	106.205.799	101.956.292	96,00
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	74.999.487	71.066.513	94,76
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.483.844.095	2.288.072.117	92,12
		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	24.643.312	20.467.373	83,05
2	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	641.809.140	485.215.684	75,60

3	Meningkatn ya Akuntabilit as Kinerja BPKD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.127.426.645	9.038.916.542	99,03
		Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	1.111.590.783	940.757.513	84,64

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yaitu ;

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, yaitu sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas serta sasaran ke 2 dengan capaian 85% yaitu sasaran Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah dan sasaran ke 3 dengan capaian AKIP BPKD A dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target, 1 (satu) indikator belum memenuhi criteria. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 100%.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 9.038.916.542,- atau 99,50% dari target alokasi Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 9.127.426.645,-. Dari 3 (Tiga) Sasaran Strategi, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas “dan terendah “ Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah

4. Saran

1. Mengadakan pelatihan dan Bimbingan teknis untuk tenaga pengelola keuangan.
2. Perlunya Optimalisasi penyusunan Laporan dan pengelolaan Aset Daerah berbasis Aplikasi
3. Perlunya Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan Daerah
4. Adanya peningkatan Koordinasi tentang Manajemen Aset seluruh SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Perlunya Kesadaran setiap ASN dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran

Painan, Januari 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KEPALA



SUHANDRI, SE.MM
Nip. 19700608 200212 1 003

Dokumentasi :



